

**ANALISIS PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA
PELATIHAN KERJA DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Oleh:

ROBIATUN ADAWIYAH

07011181722029

Konsentrasi Manajemen Sektor Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
ANALISIS PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA
PELATIHAN KERJA DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

ROBIATUN ADAWIYAH

NIM. 07011181722029

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Nurmah Semil, M.Si

19671201 199203 2002

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

19810827 200912 1002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**ANALISIS PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA
PELATIHAN KERJA DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 09 Agustus 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Nurmah Semil, M.Si.
Ketua



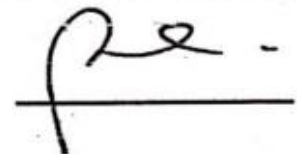
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
Anggota



Drs. Gatot Budiarto, MS.
Anggota



Junaidi, S.IP., M.Si.
Anggota

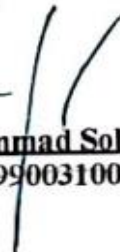


Indralaya, Agustus 2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

Telp. (0711) 580572 Fax. (0711) 580572 Kode Pos 30662

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Robiatun Adawiyah
NIM : 07011181722029
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Manajemen Sektor Publik
Alamat : -
No. HP : 0812-1212-9591

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis diatas merupakan karya sendiri , disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah - kaidah ilmiah yang berlaku . Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya diatas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme) , saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku .

Surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Palembang, Februari 2022
Yang membuat pernyataan,



Robiatun Adawiyah
07011181722029

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-NYA jualah saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kota Palembang**” ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tersusunnya skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dengan adanya semangat, bantuan, serta bimbingan sehingga semua hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan semua dukungan, semangat, bantuan, dan bimbingan kepada penulis di bawah ini:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Keluarga penulis Bapak Rusdi dan Ibu Mismiati yang senantiasa memberikan doa dan kasih sayang serta perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Rektor Universitas Sriwijaya Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, MSCE.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
5. Wakil Dekan I Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
6. Wakil Dekan II Bapak Sofyan Effendi, S.Ip., M.Si.
7. Wakil Dekan III Bapak Dr. Andy Alfatih,MPA.
8. Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Publik Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,M.PA

9. Sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Publik Ibu Erma Novida, S.Sos., M.Si.
10. Ibu Dr. Nurma Semil, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,M.PA selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak nasihat, dorongan, serta waktunya kepada penulis selama menjalani proses penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh dosen pengajar di FISIP Universitas Sriwijaya. Terimakasih atas pelajaran dan ilmu yang telah diberikan.
12. Bapak Ir. H. Mansyur Husin, selaku Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
13. Bapak dan Ibu Pegawai Bidang Pelatihan dan Produktivitas Provinsi Sumatera Selatan.
14. Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017 khususnya kampus Indralaya, semoga kesuksesan serta keberhasilan menghampiri kita semua
15. Teman spesial tersayang Kurdi Surya Alam, S.Tr.Pel. terimakasih telah mendukung penuh dalam kegiatan perkuliahanku, terimakasih juga untuk semangat, motivasi, serta bimbingan yang selalu dilontarkan hingga akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu.
16. Adikku tersayang Sulthaan Faiz, terimakasih sudah menemani saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
17. Sepupuku tersayang Putri Salsabilah, Elycia Anastasya dan Robi Sapirli, terimakasih telah memberikan dukungan yang tak hentinya dalam segala urusan perkuliahanku.
18. Sahabat-sahabatku Ettri Puspita Juniarti, Efriza Fitri Erliza, Tasya Ariani Julieta, Annisa Putri Ramadanti, dan Sutini Khodijah yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

19. Terimakasih juga kepada semua pihak yang ikut andil dalam membantu selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan laporan ini dalam mencapai kesempurnaan. Semoga seluruh bantuan dan partisipasi mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Palembang, Juli 2021

Robiatun Adawiyah

ABSTRACT

This research is titled "Analysis of Accreditation implementation of Job Training Institute in The Palembang City." The background of the research is the lack of good coordination between the Agency of Manpower and Transmigration of South Sumatra Province with LPK (Job Training Institute) in monitoring the LPK and delaying of LPK in collecting the proposed accreditation file to the Agency of Manpower and Transmigration of South Sumatra Province. This research aims to find out how the accreditation of the Job Training Institute in Palembang City. This research uses the qualitative research method. This research uses George R. Terry's theory, measured in five dimensions: planning, ORGANIZING, ACTUATING, and CONTROLLING. Data collection techniques used are observation, interview, documentation, and dialysis using Atlas.ti software. The results and discussions of this research concluded that the implementation of accreditation of job training institute in the Palembang City on organizing dimension could have been exemplary. While in the dimension of planning, ACTUATING, AND CONTROLLING, it has been good, although not yet maximal. The results of this research recommended that the Accreditation Committee of Job Training Institute (KA-LPK) further enhanced the role and function as an extension of LA-LPK's hand in carrying out accreditation, in addition to the Agency of Manpower and Transmigration of South Sumatra Province enhanced coordination with the LPK (Job Training Institute), and also further enhanced the institutional capacity of accredited job training.

Keywords: Implementation Analysis, Accreditation, Job Training Institute, The Agency of Manpower, and Transmigration of South Sumatra Province.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kota Palembang”. Adapun latar belakang dari penelitian adalah kurangnya koordinasi yang baik antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) untuk memonitoring LPK tersebut, dan keterlambatan LPK dalam mengumpulkan berkas usulan akreditasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori George R. Terry yang diukur dalam lima dimensi yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan dianalisis dengan menggunakan software Atlas.ti. Dari hasil penelitian dan pembahasan ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja di Kota Palembang pada dimensi pengorganisasian (*organizing*) dapat dikatakan sudah baik. Sedangkan pada dimensi perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*) dapat dikatakan sudah baik meskipun belum maksimal. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa hendaknya Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) lebih ditingkatkan lagi peran dan fungsi sebagai perpanjangan tangan LA-LPK dalam melaksanakan akreditasi, selain itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan lebih ditingkatkan lagi koordinasi dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), dan juga lebih ditingkatkan lagi kapasitas kelembagaan pelatihan kerja yang terakreditasi.

Kata Kunci: Analisis Pelaksanaan, Akreditasi, Lembaga Pelatihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Manajemen Sektor Publik dalam Administrasi Publik.....	12
2. Analisis Pelaksanaan.....	17
3. Akreditasi.....	18
4. Lembaga Pelatihan Kerja.....	21
B. Kerangka Pemikiran	25
C. Penelitian Terdahulu	26
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Definisi Konsep.....	35
C. Fokus Penelitian	36
D. Informan Penelitian	38
E. Data dan Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39

G. Teknik Analisis Data.....	DAFTAR ISI	39
H. Lokasi Penelitian		41
BAB IV.....		42
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		42
A. Sejarah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.....		42
B. Letak Geografis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan .		45
C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi		46
D. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan		54
E. Sumber Daya Manusia di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan		54
F. Pembahasan dan Hasil.....		57
1. Perencanaan (<i>Planning</i>).....		57
2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....		90
3. Pelaksanaan (<i>Actuating</i>)		104
4. Pengawasan (<i>Controlling</i>).....		154
BAB V		169
PENUTUP		169
A. Kesimpulan		169
B. Saran.....		170
DAFTAR PUSTAKA		171
LAMPIRAN		173

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Sumatera Selatan Tahun 2020	7
Tabel 2. Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kota Palembang Tahun 2020	8
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4. Fokus Penelitian	37
Tabel 5. Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 6. Susunan Kepanitian Bimtek Akreditasi 2020.....	58
Tabel 7. Jadwal Kegiatan Bimtek Akreditasi 2020	59
Tabel 8. Susunan Keanggotaan KA-LPK.....	79
Tabel 9. Nama-Nama Tim Asesor.....	80
Tabel 10. Belanja Bahan Non Operasional Lainnya	87
Tabel 11. Belanja Jasa Profesi.....	88
Tabel 12. Belanja Perjalanan Dinas	88
Tabel 13. Persyaratan Asesor Akreditasi.....	103
Tabel 14. Daftar Peserta Bimtek Akreditasi LPK Tahun 2021	105
Tabel 15. Narasumber Bimtek Akreditasi	106
Tabel 16. Daftar Nama Asesor yang ditugaskan dalam melaksanakan Visitasi.....	143
Tabel 17. Hasil Rapat Pleno KA-LPK Tahun 2020	152
Tabel 18. Matriks Hasil Pembahasan	162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Teori George R. Terry.....	25
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan	53
Gambar 3. Surat Pernyataan LPK Darussalam.....	61
Gambar 4. Daftar Periksa Kepatuhan Akreditasi	64
Gambar 5. Susunan Keanggotaan LA-LPK	78
Gambar 6. Honor Kegiatan Akreditasi.....	84
Gambar 7. Rincian Normatif Perjalanan Dinas Kegiatan Visitasi LPK Tahun 2020.....	85
Gambar 8. Rencana Pencairan Dana Kegiatan Akreditasi LPK 2020.....	86
Gambar 9. Website Resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan	93
Gambar 10. Website Resmi LA-LPK.....	97
Gambar 11. Surat KA-LPK (Pencapaian Implementasi Permenaker No. 34 Tahun 2016).....	100
Gambar 12. Formulir Peserta Bimtek Akreditasi LPK.....	107
Gambar 13. Sertifikat Bimtek Akreditasi.....	108
Gambar 14. Permohonan Akreditasi LPK Darussalam <i>Education and Consulting</i>	109
Gambar 15. Permohonan Akreditasi LPK PTC (Palembang <i>Training Center</i>)	110
Gambar 16. Izin LPK Darussalam <i>Education and Consulting</i>	111
Gambar 17. Izin LPK PTC (Palembang <i>Training Center</i>).....	112
Gambar 18. Halaman Depan Formulir Pendaftaran Akreditasi LPK PTC (Palembang Training Center).....	113
Gambar 19. Halaman Pertama Formulir Pendaftaran Akreditasi LPK PTC (Palembang Training Center).....	114
Gambar 20. Halaman Kedua Detail Kontak.....	114
Gambar 21. Halaman Ketiga	115
Gambar 22. Halaman keempat Profil Peserta Pelatihan.....	115
Gambar 23. Halaman kelima Profil Staf	116
Gambar 24. Halaman keenam Profil LPK dari Website	116
Gambar 25. Halaman ketujuh (Instruksi)	117
Gambar 26. Halaman Terakhir Lanjutan Instruksi.....	117
Gambar 27. Pemeriksaan Dokumen Akreditasi (Desk Assessment).....	122
Gambar 28. Standar 1 (Satu) Akreditasi LPK PTC (Palembang <i>Training Center</i>).....	123
Gambar 29. Standar 2 (Dua) Akreditasi LPK PTC (Palembang <i>Training Center</i>).....	125
Gambar 30. Standar 3 (Tiga) Akreditasi LPK PTC (Palembang <i>Training Center</i>)	129
Gambar 31. Standar 4 (Empat) Akreditasi LPK PTC (Palembang <i>Training Center</i>)	130
Gambar 32. Standar 5 (Lima) Akreditasi LPK PTC (Palembang <i>Training Center</i>)	132
Gambar 33. Standar 6 (Enam) Akreditasi LPK PTC (Palembang <i>Training Center</i>)	134
Gambar 34. Standar 7 (Tujuh) Akreditasi LPK PTC (Palembang <i>Training Center</i>)	136
Gambar 35. Standar 8 (Delapan) Akreditasi LPK PTC (Palembang Training Center).....	140
Gambar 36. Contoh Sarana dan Prasarana LPK PTC (Palembang Training Center) terhadap Standar 6 (enam)	145
Gambar 37. Rapat Pleno.....	149
Gambar 38. Pelaksanaan Bimtek Akreditasi	155

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BATCH	: Bali <i>Aviation and Tourism Center</i>
Bimtek	: Bimbingan Teknis
BKK	: Bursa Kerja Khusus
BLK	: Balai Latihan Kerja
Disnakertrans	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
FKJP	: Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan
LA-LPK	: Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
Lattas	: Latihan dan Produktivitas
LPK	: Lembaga Pelatihan Kerja
Kabid	: Kepala Bidang
KA-LPK	: Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
Kemnaker	: Kementerian Tenaga Kerja
KKNI	: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KMPI	: Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
K3	: Keselamatan Kesehatan Kerja
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PHI	: Perselisihan Hubungan Industrial
PJPT	: Pembangunan Jangka Panjang Tingkatan
PPNS	: Penyidikan Pegawai Negeri Sipil
PTC	: Palembang <i>Training Center</i>
RKBU	: Rencana Kebutuhan Barang Unit
RPBU	: Rencana Pemeliharaan Barang Unit
RTSP	: Rencana Teknis Tata Ruang Satuan Permukiman
Sarpras	: Sarana dan Prasarana
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SKK	: Sertifikat Kualifikasi Kerja
SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SPR	: Surat Pengantar Rekrut
TKA	: Tenaga Kerja Asing
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TTG	: Teknologi Tepat Guna

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	173
Lampiran 2. Analisis Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kota Palembang	180
Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Wawancara.....	182

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kota Palembang merupakan suatu program dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan setiap tahunnya untuk memberikan kredibilitas kepada LPK. Subsistem Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang sangat penting peranannya untuk penjaminan mutu dan kredibilitas LPK adalah LA-LPK (Lembaga Akreditasi – Lembaga Pelatihan Kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. Mengingat pentingnya peran LA-LPK dalam sistem pelatihan kerja nasional, maka peran tugas dan kapasitas LA-LPK baik secara kelembagaan maupun fungsi perlu di optimalkan salah satu syarat agar pelatihan kerja ini bermutu maka harus memiliki LPK yang kredibel LA-LPK (Lembaga Akreditasi – Lembaga Pelatihan Kerja) dan KA-LPK (Komiten Akreditasi - Lembaga Pelatihan Kerja) sebagai penjamin mutu LPK pemerintahan dan LPK swasta harus memiliki sistem akreditasi yang baik.

Pentingnya akreditasi ialah untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan kerja dan meningkatkan kredibilitas LPK. Salah satu syarat agar pelatihan kerja bermutu maka harus memiliki LPK yang kredibel, LA-LPK dan KA-LPK sebagai penjamin mutu LPK pemerintah dan LPK swasta harus memiliki sistem akreditasi yang baik. Dengan penjaminan mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu, mulai dari menetapkan standar, dan secara berkelanjutan meningkatkan standar.

Akreditasi yang dilakukan terhadap LPK mengacu kepada Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI) yaitu sesuai kesatuan yang terdiri dari delapan standar mutu yang diisyaratkan untuk dipenuhi oleh LPK yang ingin mengajarkan kualifikasi kerja (Sertifikat Kualifikasi Kerja/SKK) atau sebagian kualifikasi berdasarkan suatu klaster dari unit kompetensi (SKKNI) yang terdaftar dalam KKNI, dan program pelatihan kerja tertentu. Setiap kedelapan standar memiliki kriteria dan LPK harus menyediakan bukti yang dipercaya akan mengindikasikan kesesuaian.

Akreditasi mengindikasikan bahwa mutu dari pelatihan yang ditawarkan oleh LPK memenuhi atau melebihi standar yang diisyaratkan ketika mereka diaplikasikan pada setiap kualifikasi kerja atau program pelatihan kerja tertentu yang diajarkan oleh LPK. Instrumen akreditasi LPK yang diperbarui ini mempertimbangkan tuntutan standar kualifikasi nasional, kebutuhan standar kompetensi dunia industri, serta kesetaraan dengan standar akreditasi lembaga pelatihan dan pendidikan secara nasional maupun internasional. Selain itu pembaharuan ini juga mempertimbangkan kondisi dan keberadaan LPK secara nasional serta kemampuannya untuk menerapkan dalam manajemen LPK dan untuk penjaminan mutu serta kredibilitas LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) adalah LA-LPK (Lembaga Akreditasi – Lembaga Pelatihan Kerja) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 akreditasi adalah suatu asesmen yang independen supaya LPK memberikan layanan pelatihan yang bermutu tinggi sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan program pelatihan kerja dan mengacu kepada Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI). LPK harus diakreditasi untuk mengajarkan pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja yang akan memberikan SKK atau klaster SKKNI dari jalur kejuruan dalam KKNI. Suatu LPK

juga dapat diakreditasi untuk memberikan pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja berdasarkan standar lainnya, seperti contoh standar internasional atau standar khusus.

KMPI yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari 8 (delapan) standar. Bahwa setiap standar memiliki kriteria dan LPK harus menyediakan bukti yang dipercaya akan mengindikasikan bahwa mutu dari pelatihan yang ditawarkan oleh LPK memenuhi atau melebihi standar yang disyaratkan ketika mereka diaplikasikan pada setiap kualifikasi kerja atau program pelatihan kerja tertentu yang diajarkan oleh LPK.

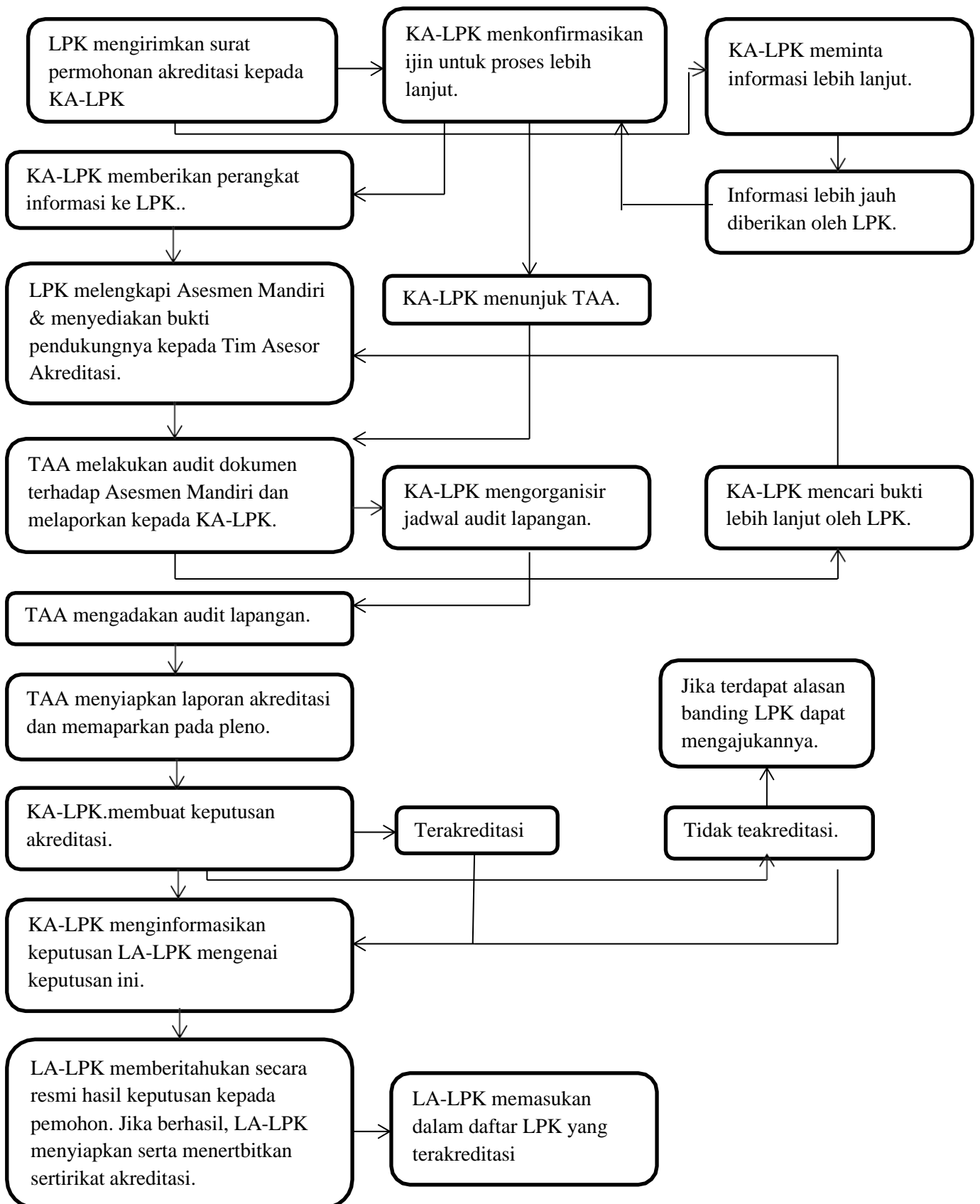
Berkaitan dengan kualifikasi, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI merupakan Kerangka Penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dengan memiliki KKNI maka Indonesia akan semakin mudah melakukan penyetaraan dengan kerangka kualifikasi negara lain. Secara nasional KKNI juga mendorong berbagai pihak menyesuaikan, melaksanakan dan mencapai kualifikasi tersebut dalam bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

Mewujudkan KKNI sebagai standar nasional perlu didukung sistem pendidikan dan pelatihan kerja yang sesuai. Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) memiliki tiga pilar utama yaitu standar kompetensi kerja, lembaga pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi profesi. Pemerintah melakukan standarisasi kompetensi, Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK) melakukan standarisasi (akreditasi) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melakukan standarisasi profesi.

Suatu LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) di akreditasi dalam melaksanakan pelatihan apakah terhadap Sertifikat Kualifikasi Kerja (SKK) tertentu atau klaster SKKNI atau program pelatihan tertentu berdasarkan standar lainnya. Akreditasi tidak akan mencakup layanan pelatihan lainnya yang ditawarkan LPK. Akreditasi adalah suatu asesmen yang independen bahwa LPK dan pendidikan kejuruan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi sesuai standar yang ditentukan oleh KEMNAKER LPK harus diakreditasi untuk melaksanakan pelatihan kerja dan pendidikan kejuruan yang akan memberikan SKK atau klaster SKKNI dari jalur kejuruan sesuai KKNi. Suatu LPK dapat juga diakreditasi untuk memberikan pelatihan kerja dan pendidikan kejuruan yang menggunakan standar SKKNI, sebagai contoh standar internasional, standar khusus dan standar lokal.

Secara internasional, pengakuan dari kualifikasi sebagian tergantung pada negara yang akan diakui telah memiliki proses mutu bagi pendidikan dan pelatihannya. Akreditasi adalah suatu pengakuan formal bahwa LPK dapat menawarkan layanan pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi yang akan memberikan Sertifikat Kualifikasi Kerja (SKK), klaster SKKNI atau pengakuan berdasarkan standar lainnya yang terkait. Terhadap layanan pendidikan dan pelatihan kerja yang bermutu tinggi yang akan memberikan SKK, klaster dari SKKNI atau pengakuan berdasarkan standar lainnya yang terkait.

Proses Akreditasi



Sumber : Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia.

Setelah LPK terakreditasi, tanggung-jawab selanjutnya adalah LPK harus menjaga kepatuhan mereka terhadap standar akreditasi. Dari waktu ke waktu LA-LPK apakah sendiri atau melalui KA-LPK yang akan memeriksa LPK untuk memastikan mereka terus mematuhi standar. Jika ada keluhan dari siswa pemberi kerja maka kemungkinan akan dilakukan asesmen ulang segera. Hal terpenting yang harus dilakukan setiap awal tahun, LPK harus menyerahkan audit internal atau asesmen mandiri terhadap standar akreditasi untuk menunjukkan kepada KA-LPK bahwa mereka selalu mentaati standar akreditasi.

Jika LPK tidak mampu memenuhi proses akreditasi awal mereka tidak akan terakreditasi sampai mereka memenuhinya, KA-LPK akan memberikan saran tentang apa yang perlu dilakukan dan menetapkan skala waktu dengan LPK. Jika LPK telah terakreditasi dan ternyata tidak memenuhi standar, mereka akan diberi kesempatan untuk memenuhinya. Jumlah waktu yang diberikan akan tergantung pada tingkat keparahan ketidakpatuhan pada standar. Sebagai contoh, materi pelatihan tidak sesuai atau kualifikasi staf perlu diperbaiki langsung.

Akreditasi LPK dapat ditangguhkan jika mereka tidak memperbaiki bagian-bagian yang belum dipatuhi dalam kerangka waktu yang disepakati. Selama penangguhan mereka tidak boleh menerima mahasiswa baru. Dalam beberapa kasus LPK mungkin diminta untuk menilai ulang atau mengajar kembali pesertanya. Jika ketidaktaatan berlanjut, akreditasi LPK akan dibatalkan atau ditangguhkan. LPK bertanggung-jawab untuk memastikan bahwa mereka sesuai dan mempertahankan kepatuhan terhadap standar akreditasi

Akreditasi dapat diperbaharui setiap tahun setelah penyerahan internal audit/ asesmen mandiri dan staf terhadap standar akreditasi. KA-LPK juga akan memfasilitasi audit tahunan mengenai kepatuhan terhadap standar mutu. Setiap tiga tahun, LPK harus

kembali mendaftar untuk akreditasi dan melakukan suatu asesmen eksternal oleh seorang Asesor Kepatuhan.

Tabel 1. Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Sumatera Selatan Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah LPK
1	Ogan Komering Ulu	14 LPK
2	Ogan Komering Ilir	9 LPK
3	Muara Enim	9 LPK
4	Lahat	9 LPK
5	Musi Rawas	11 LPK
6	Musi Banyuasin	4 LPK
7	Banyuasin	10 LPK
8	OKU Timur	29 LPK
9	Ogan Ilir	7 LPK
10	Empat Lawang	8 LPK
11	Pali	1 LPK
12	Musi Rawas Utara	3 LPK
13	Palembang	30 LPK
14	Prabumulih	7 LPK
15	Pagar Alam	3 LPK
16	Lubuk Linggau	7 LPK

Sumber : Bidang Pelatihan dan Produktivitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat jumlah LPK yang ada di Sumatera Selatan. Dari beberapa kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan, Kota Palembang menyumbangkan LPK paling banyak yaitu sebesar 30 LPK untuk di akreditasi. Oleh sebab itu penulis memilih LPK di Kota Palembang dalam penelitian ini dan juga proses akreditasi dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang.. Alasan Penulis memilih LPK di Kota Palembang juga karena penulis berdomisili di Kota Palembang sehingga memudahkan penulis dalam penelitian ini. Selain itu LPK di Kota Palembang bagi penulis sudah cukup mewakili dengan jumlah LPK paling banyak dari beberapa LPK yang ada di Sumatera Selatan dalam penelitian ini.

Beberapa permasalahan yang umumnya terjadi pada pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, antara lain kurangnya koordinasi yang baik antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk memonitoring LPK tersebut, sehingga banyak LPK yang belum terakreditasi.

Tabel 2. Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kota Palembang Tahun 2020

NO	NAMA LPK	NAMA PIMPINAN	KET. AKREDITASI
1	Darussalam Education and Consulting	Nurlaila	Terakreditasi
2	Bina Indonesia Sejahtera	Aang Kuriniawan	Proses Bimtek
3	Elrahma Palembang	Supriyanto, S.Pd., MM	Terakreditasi
4	Amikom	Purnama Sari, S.Pd., S.Kom	Terakreditasi
5	Amikom English Course	Amir Hamsyah, S.Kom	Proses Bimtek
6	Rifky Bakery Resto	Pusparini, Amd	Proses Bimtek
7	Sakura Gakuin Center	Hendri Yudi Permana	Proses Bimtek
8	Duta Prestasi	Aida Farhayati, SH., MH	Proses Bimtek
9	Institut Pendidikan dan Pelatihan Wirausaha Indonesia (IPPWI)	July Rianthony Nk	Proses Bimtek
10	Potensia	Desi Apriani	Terakreditasi
11	LPTO Siap Mandiri	H. Suparman, S.Pd., M.Si	Terakreditasi
12	Kiamori Academy	Akbar Andican	Proses Bimtek
13	Intensive English Course (IEC)	Drs. Edward Novandi	Proses Bimtek
14	PT Standar Profesional Indonesia - Safety Training School	Mamta Maharani	Proses Bimtek
15	Sriwijaya Teknigraphy	Ardiansyah, S.Kom., MM	Terakreditasi
16	Novi	Siti Chodidjah	Terakreditasi
17	Yayasan Bakti Perdana	Ir. Eti Susanti, M.Si	Terakreditasi
18	Karya Nyata	Merry	Terakreditasi
19	Jundi Learning Center	Diana Nursanti, M.Pd	Proses Bimtek
20	Sriwijaya Universal	Irfa Kodri, ST., MT	Terakreditasi
21	Fenkaki Global	Kailani	Terakreditasi
22	Ekselen Palembang	Suwardi, S.Pd	Proses Bimtek

23	Pelangi	Januardi, SE., M.Si	Proses Bimtek
24	LPK31 Palembang	Asmawi Mangku Alam	Proses Bimtek
25	Perhotelan	Achmad Kesuma	Terakreditasi
26	Wirasena Jaya Sakti	Sandy Pratama	Proses Bimtek
27	Bunda Mandiri	Aryanisila	Proses Bimtek
28	Mirsa Prima	Sukhaidi	Proses Bimtek
29	PTC (Palembang Training Center)	Ella Rosita, ST., MM	Proses Bimtek
30	Cahaya Sampurna Abadi	Sri Budi Wahyuningsih	Proses Bimtek
31	Areumdaun	Andi Irawan	Proses Bimtek

Sumber : Bidang Pelatihan dan Produktivitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan tabel 2 maka dapat dilihat bahwa LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) di Kota Palembang masih banyak yang belum terakreditasi. Data dari tabel 2 terdapat 19 LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang belum terakreditasi dan masih dalam proses pembinaan bimbingan teknis dari jumlah 31 LPK di Kota Palembang. LPK yang telah terakreditasi akan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Jika LPK tidak mampu memenuhi proses akreditasi awal mereka tidak akan terakreditasi sampai mereka memenuhinya. Dan apabila LPK telah terakreditasi dan ternyata ditemukan tidak memenuhi standar, mereka akan diberi kesempatan untuk memenuhinya. Jumlah waktu yang diberikan akan tergantung pada tingkat keparahan ketidakpatuhan pada standar. Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa hanya 12 LPK yang terakreditasi dan tidak mencapai setengah dari LPK yang mendaftar, sisanya masih dalam proses bimtek. Selain itu, belum adanya aturan bersifat legal yang mewajibkan LPK untuk mengakreditasi lembaganya.

Permasalahan berikutnya adalah keterlambatan LPK dalam mengumpulkan berkas usulan akreditasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dari batas waktu yang telah ditentukan, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan selalu memberikan tenggang waktu. Akibatnya terjadi penguluran waktu yang tidak efisien dalam proses pelaksanaan akreditasi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas tersebut, perlu diteliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kota Palembang, untuk itulah penulis memilih di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, dengan penelitian yang berjudul Analisis Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang akan dikaji oleh penulis, yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penullis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat membantu perkembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya konsentrasi Manajemen Sektor Publik dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik ingin meneliti dalam bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, masukan, dan pertimbangan bagi pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya dalam

mekanisme akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dimana yang akan datang dapat dilaksanakan dengan lebih bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthoillah, A. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Pustaka
- Apriliani, K. (2020). Pelaksanaan Pelatihan Kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Bali Aviation and Tourism Center (BATCH) Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Khatulistiwa Law Review*, 1(1). <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/44/21>
- Haifaturrahmah. (2018). Analisis Pencapaian 8 Komponen Standar Akreditasi SD/MI di Kota Mataram. *Elementary: Kajian Teori Dan Hasil Penelitian Sekolah Dasar*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/elementary.v1i1.139>
- Jogiyanto. (1999). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Andi Offset.Setia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Kerangka Mutu Pelatihan indonesia.
- Labunga, A., Nur, N. M., & Labatjo, R. (2018). Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Banggai. *Yustisiabel*, 2(2). <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/view/227/200>
- Laksaguna, Gusti Putu. 2017. *Pedoman Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja*.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks.
- Nisa, E. K. (2018). Analisis Pengaruh Akreditasi Program Studi terhadap Intensitas Belajar dan Harapan Masa Depan (Studi Kasus di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang). *At-Taqaddum*, 10(2), 201–218. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/at.v10i2.3028>
- Nujumuddin. (2019). Dampak Kebijakan Akreditasi terhadap Peningkatan Kinerja Guru Madrasah (Studi di MI Nurul Muhsinin Desa Batujai). *Penelitian Keislaman*, 15(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/jpk.v15i1.1106>
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Pratama, A. H., & Widowatu, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai UPT BLK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus. *Indonesian of Public Policy and Management Review*. <https://www.neliti.com/id/publications/183108/analisis-kinerja-pegawai-upt-blk-dinas-sosia-analisis-kinerja-pegawai-upt-blk-di>
- Simanjuntak, J. P. (2011). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Singarimbun, Masri, & Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju.
- Setiawan, H. T., Jati, S. P., & Fatmasari, E. Y. (2018). Analisis Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Puskesmas pada Kelompok Kerja Administrasi dan Manajemen di Kabupaten Pemalang. *Kesehatan Masyarakat*, 6(5). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/21980>

- Subijanto, & Wiratno, S. (2012). Analisis Kinerja Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. *Pendidikan Dan Kebudayaan*, 18(3), 310–318. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v18i3.90>
- Sururi. (2008). Pengaruh Akreditasi Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Se-Kota Bandung. *Administrasi Pendidikan*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jap.v8i2.6295>
- Terry, G. R. (2012). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.
- Usman, A. A., & Maruf. (2013). Analisis Pelaksanaan Pembelajaran dalam Program Praktek Lapangan II Mahasiswa Pendidikan Fisika SKTIP Kie Raha Ternate. *Pendidikan Fisika*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jpf.v1i2.194>